

## KATA PENGANTAR

### **Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI**

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan dan penyajian buku Ringkasan dan Telaahan yang disusun oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Badan Keahlian DPR RI sebagai *supporting system* dapat terselesaikan.

Dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 3 April 2018, Badan Pemeriksa Keuangan RI menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) beserta Laporan Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2017 yang memuat ringkasan dari 449 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang terdiri 6 LHP Keuangan, 239 LHP Kinerja, dan 204 LHP Dengan Tujuan Tertentu, yang berisi hasil pemeriksaan:

1. Opini atas 6 Laporan Keuangan (5 LKPD Tahun 2016 dan 1 Laporan Keuangan Penutup Badan Pengelola Dana Abadi Umat);
2. Simpulan kinerja pelaksanaan/pelayanan/kegiatan/program pemerintah; dan
3. Simpulan atas penerapan Sistem Pengendalian Intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

IHPS II Tahun 2017 disajikan berdasarkan pengelompokan pengelola anggaran, yaitu Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMD, BLUD, dan BUMN serta Badan lainnya.

Hasil pemeriksaan setiap pengelola anggaran dikelompokkan berdasarkan jenis pemeriksaan, yaitu pemeriksaan keuangan yang dilakukan dalam rangka memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan; pemeriksaan kinerja untuk menilai aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas; dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu bertujuan memberikan simpulan atas suatu hal yang diperiksa.

Ringkasan dan Telaahan ini dapat dijadikan bahan untuk melakukan pendalaman atas kinerja Mitra Kerja Komisi dalam melaksanakan program-program prioritas pembangunan nasional, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan rakyat, serta dapat melengkapi sudut pandang atas kualitas Opini BPK dan rekomendasi BPK terhadap kinerja Kementerian/Lembaga dan Badan Publik lainnya.

Dalam buku ini tersaji ringkasan laporan pemeriksaan BPK untuk Kementerian/Lembaga yang menjadi Mitra Kerja Komisi XI, yang terdiri dari 4 (empat) Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu dan 3 (tiga) Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kinerja, antara lain:

1. Kementerian/Lembaga dalam Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu, dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yaitu pemeriksaan atas Penatausahaan Piutang, Penagihan Pajak, dan Pengelolaan Barang Sitaan dengan *17 temuan senilai Rp16.952.760.000,00*;
  - b. Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit (BPDPKS) yaitu pemeriksaan atas pengelolaan keuangan dengan *13 temuan senilai Rp113.045.910.000,00*;
  - c. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yaitu pemeriksaan atas Realisasi Belanja dan Dana Bantuan Kedinasan dengan *7 (tujuh) temuan senilai Rp607.330.000,00*; dan
  - d. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yaitu pada pemeriksaan Penyelenggaraan Katalog Elektronik dengan *8 (delapan) temuan*.
2. Kementerian/Lembaga dalam Pemeriksaan Kinerja, antara lain:
  - a. Pemeriksaan kinerja pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) atas Efektivitas Proses Kepabeanan atas Kegiatan Impor Barang dengan *29 temuan*;
  - b. Pemeriksaan kinerja pada Otoritas Jasa Keuangan atas Efektivitas Pengawasan Kegiatan Jasa Keuangan di Sektor Perasuransian dengan *8 (delapan) temuan*; dan
  - c. Pemeriksaan kinerja pada Badan Pusat Statistik (BPS) atas Penyusunan PDB dan PDRB dengan jumlah *7 (tujuh) temuan*.

Dalam penyusunan Ringkasan dan Telaahan ini Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara mengundang Para Pakar/Peneliti serta Auditorat Keuangan BPK RI untuk berdiskusi dan kami juga menyajikan dalam bentuk *infografis* yang dapat memudahkan pemahaman tentang hasil pemeriksaan BPK RI yang terperinci dan memuat tentang Penjelasan, Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan, Akibat, dan Rekomendasi.

Akhir kata kami sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan ini.

Jakarta, April 2018

**DRS. HELMIZAR**

**NIP. 19640719 199103 1 003**

## DAFTAR ISI

1.	Kata Pengantar Kepala PKAKN.....	i
2.	Daftar Isi.....	iv
3.	<b>Direktorat Jenderal Pajak</b>	
	<b>PDTT atas Penatausahaan Piutang, Penagihan Pajak, dan Pengelolaan Barang Sitaan Tahun 2016 s.d. Semester I Tahun 2017 pada Direktorat Jenderal Pajak dan Instansi Vertikal Dibawahnya serta Instansi Terkait Lainnya</b>	
	Infografis.....	1
	Tujuan dan Hasil Pemeriksaan.....	2
	Hasil Pemeriksaan.....	4
4.	<b>Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit</b>	
	<b>PDTT atas Pengelolaan Keuangan Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit pada BDPDKS dan Instansi Terkait Lainnya Tahun 2015 s.d. 2017</b>	
	Infografis.....	44
	Tujuan dan Hasil Pemeriksaan.....	45
	Hasil Pemeriksaan.....	47
	Pendapatan Pungutan	47
	Penggunaan Dana	49
5.	<b>Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan</b>	
	<b>PDTT atas Realisasi Belanja dan Dana Bantuan Kedinasan pada Badan Tahun 2016 s.d. Semester I Tahun 2017</b>	
	Infografis.....	59
	Tujuan dan Hasil Pemeriksaan.....	60
	Hasil Pemeriksaan.....	62
6.	<b>Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</b>	
	<b>PDTT atas Penyelenggaraan Katalog Elektronik Tahun Anggaran 2016 dan 2017 (Semester I) pada LKPP dan Instansi Terkait Lainnya</b>	
	Infografis.....	82
	Tujuan dan Hasil Pemeriksaan.....	83
	Hasil Pemeriksaan.....	85

<b>7. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai</b>	
<b>Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Proses Kepabeanaan atas Kegiatan Impor Barang Tahun Anggaran 2015 s.d. 2017 (Semester I) pada DJBC serta Pengelola Portal <i>Indonesia National Single Window</i></b>	
Infografis.....	94
Daftar Temuan.....	95
Hasil Pemeriksaan.....	
Pengawasan terhadap impor barang Larangan dan/atau Pembatasan (Lartas).....	98
Proses penyusunan jalur dan pemutakhiran profil.....	102
Proses penelitian tarif dan nilai pabeaan.....	106
<b>8. Otoritas Jasa Keuangan</b>	
<b>Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengawasan Kegiatan Jasa Keuangan di Sektor Perasuransian Tahun 2015 s.d. Semester I Tahun 2017 pada Otoritas Jasa Keuangan</b>	
Infografis.....	114
Daftar Temuan.....	115
Hasil Pemeriksaan.....	116
<b>9. Badan Pusat Statistik</b>	
<b>Pemeriksaan Kinerja atas Penyusunan PDB dan PDRB Tahun 2016 dan 2017 pada Badan Pusat Statistik</b>	
Infografis.....	128
Daftar Temuan.....	129
Hasil Pemeriksaan.....	130

**Kementerian  
Keuangan**

Laporan Hasil  
Pemeriksaan  
Dengan Tujuan  
Tertentu  
IHPS II Tahun 2017

**Direktorat Jenderal Pajak**

**Penatausahaan Piutang, Penagihan Pajak,  
dan Pengelolaan Barang Sitaan  
Tahun 2016 s.d Semester I Tahun 2017  
di Jakarta, Pekanbaru, Palembang, Bandung, dan  
Bekasi**

<http://puskajiakn.dpr.go.id>

17

**Temuan**

**Nilai**

**Rp16.952.760.000,00\***

**Kekurangan Penerimaan**

**Rp16.952.760.000\***

\*) Sumber: Lampiran 2.1 IHPS II Tahun 2017

40

**Rekomendasi**



**Simpulan  
Pemeriksaan**

"DJP dalam melaksanakan penatausahaan piutang pajak, penagihan pajak, dan pengelolaan barang sitaan **belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku**".

**PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU  
ATAS  
PENATAUSAHAAN PIUTANG, PENAGIHAN PAJAK,  
DAN PENGELOLAAN BARANG SITAAN  
TAHUN 2016 S.D. SEMESTER I TAHUN 2017  
PADA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DAN INSTANSI  
VERTIKAL DI BAWAHNYA SERTA INSTANSI TERKAIT  
LAINNYA  
DI JAKARTA, PEKANBARU, PALEMBANG, BANDUNG,  
DAN BEKASI**

---

**Tujuan dan Hasil Pemeriksaan**

Pemeriksaan bertujuan untuk menilai apakah kegiatan penatausahaan piutang penagihan, serta pengelolaan barang sitaan telah sesuai dengan ketentuan.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa DJP dalam melaksanakan penatausahaan piutang pajak, penagihan pajak, dan pengelolaan barang sitaan belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

<b>NO</b>	<b>TEMUAN</b>
1	Sistem Informasi pada Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) masih belum mendukung proses bisnis kegiatan penagihan pajak.
2	Penatausahaan piutang pajak belum menghasilkan piutang yang mutakhir.
3	Terdapat 70 ketetapan pajak senilai Rp1.030.911.072,00 pada lima Kanwil DJP dan 21 KPP terindikasi daluwarsa penetapan.
4	Restitusi Pajak belum memperhitungkan utang pajak dari Wajib Pajak sebesar Rp868.371.951.041,31.
5	Pengelolaan pendapatan dan piutang pajak dalam rangka impor belum memadai.
6	Surat Ketetapan Pajak (SKP) sebesar Rp915.842.883.386,00 kurang memperhatikan potensi Wajib Pajak (WP) dan jangka waktu tahun pajak.
7	Perencanaan target penerimaan yang berasal dari kegiatan penagihan tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya.

8	Kanwil DJP dan KPP tidak melaksanakan kebijakan penagihan pajak secara menyeluruh.
9	DJP belum memaksimalkan tindakan penagihan kepada Wajib Pajak hingga piutang pajak daluwarsa penagihan sebesar Rp1.930.379.469.154,00 dan KPP tidak segera melaksanakan tindakan penagihan atas piutang pajak yang telah jatuh tempo dan menjadi prioritas penagihan.
10	Penyelesaian piutang pajak atas tujuh Wajib Pajak berlarut-larut.
11	Upaya KPP dalam menagih piutang pajak atas Wajib Pajak yang memiliki tanda-tanda kepailitan, dalam proses pailit, atau telah selesai proses kepailitannya belum sesuai dengan strategi penagihan yang telah ditetapkan.
12	Piutang pajak delapan WP Badan Usaha Tetap (BUT) sebesar Rp5.242.316.023.153,00 tidak dapat tertagih.
13	Tindakan penagihan pajak pada WP Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tidak konsisten.
14	Piutang pajak kepada Bendaharawan Pemerintah belum dapat ditagih sebesar Rp16.952.766.347,00.
15	DJP tidak konsisten dalam menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) bunga penagihan.
16	Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Biaya Penagihan belum dikelola secara optimal.
17	Pengelolaan barang sitaan pada Direktorat Jenderal Pajak kurang memadai.



Laporan Hasil  
Pemeriksaan  
Dengan Tujuan  
Tertentu  
IHPS II Tahun 2017

## Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit

Pengelolaan Keuangan  
dan Instansi Terkait Lainnya  
Tahun 2015 s.d 2017  
di Jakarta dan Daerah

### 1 Temuan

Pendapatan Pungutan

### Temuan

Penggunaan Dana

12

Nilai Temuan

Rp113.045.910.000,00\*

Kerugian Negara

Rp113.045.910.000,00\*

\*) Sumber: Lampiran 2.1 IHPS II Tahun 2017

Rekomendasi

16

### Simpulan atas Pemeriksaan

Pengelolaan pungutan dan penggunaan dana perkebunan kelapa sawit *belum sepenuhnya didukung dengan sistem pengendalian intern yang memadai dan belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan terkait pengelolaan pungutan dan penggunaan dana perkebunan kelapa sawit*



**PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU  
 ATAS  
 PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN PENGELOLA  
 DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT (BPDPKS)  
 PADA  
 BPDPKS DAN INSTANSI TERKAIT LAINNYA  
 TAHUN 2015 S.D. 2017  
 DI JAKARTA DAN DAERAH**

---

**Tujuan dan Hasil Pemeriksaan**

Tujuan pemeriksaan adalah untuk menilai (1) kecukupan desain dan implementasi Sistem Pengendalian Intern dan (2) kepatuhan BPDPKS terhadap peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan pungutan dan penggunaan dana perkebunan kelapa sawit. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemeriksaan diarahkan pada sasaran pendapatan pungutan produk ekspor kelapa sawit dan penggunaannya pada BPDPKS selama Tahun 2015 s.d. 2017.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pengelolaan pungutan dan penggunaan dana perkebunan kelapa sawit pada BPDPKS dan Instansi Terkait Lainnya Tahun 2015 s.d. 2017 **belum sepenuhnya didukung dengan sistem pengendalian intern yang memadai dan belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan terkait pengelolaan pungutan dan penggunaan dana perkebunan kelapa sawit**, karena temuan-temuan antara lain sebagai berikut.

NO	TEMUAN
<b>Pendapatan Pungutan</b>	
1	BPDPKS belum melakukan rekonsiliasi untuk memastikan pengenaan pungutan dan Bea Keluar atas volume ekspor komoditas perkebunan kelapa sawit dan/atau turunannya telah dilaksanakan sesuai ketentuan.
<b>Penggunaan Dana</b>	
2	Dana pungutan atas ekspor komoditas perkebunan kelapa sawit dan/atau turunannya belum dapat sepenuhnya mendukung pengembangan kelapa sawit berkelanjutan.
3	Terdapat risiko kelebihan pembayaran insentif Biodiesel periode Mei 2016 s.d. April 2017 minimal sebesar Rp68.105.447.148.

4	BPDPKS belum menagih kelebihan pembayaran ongkos angkut Biodiesel sebesar Rp6.629.327.292,00.
5	Pembayaran insentif Biodiesel untuk penyaluran tahap II dan III periode Mei 2016 s.d. April 2017 sebesar Rp102.844.533.000,00 tidak sesuai ketentuan.
6	Penentuan alokasi volume penyaluran Bahan Bakar Nabati (BBN) jenis Biodiesel tidak memiliki dasar hukum dan melebihi kapasitas produksinya.
7	Besaran konversi <i>Crude Palm Oil</i> (CPO) dalam formula Harga Indeks Pasar (HIP) Biodiesel tidak diketahui rinciannya dan pembayaran insentif dilakukan tanpa mempertimbangkan faktor konversi sesuai hasil uji laboratorium
8	Pengalokasian anggaran dana cadangan permanen dan investasi jangka panjang dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) belum jelas dasar pertimbangannya
9	Pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan pelatihan petani, pelatihan masyarakat umum, dan riset tidak didukung rincian kegiatan/biaya dan bukti pertanggungjawaban
10	Verifikasi, monitoring, dan evaluasi atas penyaluran dana untuk kegiatan peremajaan lahan perkebunan kelapa sawit belum memadai
11	Hasil riset pengembangan industri sawit belum dapat dimanfaatkan
12	Pembayaran uang harian biaya perjalanan dinas luar negeri sebesar Rp299.374.875,00 untuk kegiatan promosi BPDPKS Tahun 2015 s.d. Semester I 2017 tidak dilengkapi bukti yang memadai
13	BPDPKS belum menetapkan status PPh Pasal 21 atas remunerasi pegawai yang telah ditanggung dan dibayarkan selama periode Juli 2015 s.d. Juli 2016 sebesar Rp3.572.056.506,00

Temuan-temuan yang akan dibahas lebih lanjut dalam telaahan ini adalah temuan yang mempengaruhi pengelolaan pungutan dan penggunaan dana perkebunan kelapa sawit pada BPDPKS, **yaitu pada temuan nomor 1 dalam pendapatan pungutan dan nomor 2, 3, 4, 5, dan 13 dalam penggunaan dana.**

Laporan Hasil  
Pemeriksaan  
Dengan Tujuan  
Tertentu

IHPS II Tahun 2017

## Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Realisasi Belanja dan Dana Bantuan Kedinasan  
Tahun 2016 s.d Semester I 2017

di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera  
Selatan, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Nusa  
Tenggara Barat, dan Maluku Utara

**7** **Temuan**  
Nilai  
**Rp607.330.000,00\***

**Kerugian Negara**  
**Rp529.650.000,00\***

**Kekurangan Penerimaan**  
**Rp77.680.000,00\***

\*) Sumber: Lampiran 2.1 IHPS II Tahun 2017

**Rekomendasi**

**22**



**Simpulan  
Pemeriksaan**

"Berdasarkan Pemeriksaan atas Realisasi Belanja dan Dana Bantuan Kedinasan Tahun 2016 s.d Semester I 2017, menyajikan pengendalian internal dan pelaksanaan kegiatan yang **belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku**"

**PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU  
 ATAS  
 REALISASI BELANJA DAN DANA BANTUAN KEDINASAN  
 PADA  
 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN  
 PEMBANGUNAN  
 TAHUN 2016 S.D. SEMESTER I TAHUN 2017  
 DI JAKARTA, JAWA BARAT, JAWA TENGAH, SUMATERA  
 SELATAN, SUMATERA UTARA KALIMANTAN TIMUR,  
NUSA TENGGARA BARAT, DAN MALUKU UTARA**

**Tujuan dan Hasil Pemeriksaan**

Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai apakah sistem pengendalian intern atas kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja dan dana bantuan kedinasan telah dilaksanakan secara memadai dan menguji apakah pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja dan dana bantuan kedinasan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil pemeriksaan menunjukkan permasalahan signifikan yang perlu mendapat perhatian atas pengendalian internal dan pelaksanaan kegiatan yang **belum sepenuhnya sesuai dengan kriteria yang berlaku**, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

NO	TEMUAN
1	Proses perencanaan atas kegiatan yang menggunakan Bantuan Kedinasan belum dilaksanakan sesuai ketentuan yang disyaratkan.
2	Pelaksanaan kegiatan yang menggunakan Dana Bantuan Kedinasan di lingkungan BPKP masih belum sesuai ketentuan.
3	Perlakuan atas kegiatan Bantuan Kedinasan dengan Pendapatan Negara Bukan Pajak di lingkungan BPKP tidak konsisten.
4	Bukti pertanggungjawaban kegiatan yang menggunakan Dana Bantuan Kedinasan belum diadministrasikan secara baik untuk mendukung pelaporan yang transparan dan akuntabel.
5	Penyajian dan pengungkapan Bantuan Kedinasan Tahun 2016 dan Semester I Tahun 2017 belum memadai dan belum dicatat secara konsisten di lingkungan BPKP.

6	Pelaksanaan rapat di dalam kantor belum dipotong PPh 21 minimal sebesar Rp77.685.000.
7	Terdapat kelebihan pembayaran atas delapan kontrak pekerjaan pada empat Satker sebesar Rp91.767.991.

Laporan Hasil  
Pemeriksaan  
Dengan Tujuan  
Tertentu  
IHPS II Tahun 2017

Lembaga Kebijakan Pengadaan  
Barang/Jasa Pemerintah

Penyelenggaraan Katalog Elektronik  
TA 2016 dan TA 2017 (Semester I)

## Hasil Pemeriksaan

8

Temuan

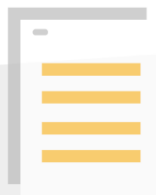


*Terdapat permasalahan yang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Penyelenggaraan Katalog Elektronik Tahun 2016 dan 2017 (Semester I)*

Pemalahan harga atas pembelian dua unit *Damen Cutter Suction Dredger* sebesar **€1.035.748,60\*** atau sebesar **Rp16.455.208.926,48\*** oleh K/L/D/I.

Pengadaan produk *Pakkat Road Maintenance Truck PRMT C3200* Tahun 2016 seharga **Rp1.900.000.000,00\*** diindikasikan tidak sesuai dengan barang yang ditawarkan

\*) Sumber: LHPD TT LKPP



25

Rekomendasi



Simpulan  
Pemeriksaan

"Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Penyelenggaraan Katalog Elektronik Tahun 2016 dan 2017 (Semester I) pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Instansi terkait Lainnya *belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku*"

**PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU  
 ATAS  
 PENYELENGGARAAN KATALOG ELEKTRONIK  
 TAHUN ANGGARAN 2016 DAN 2017 (SEMESTER I)  
 PADA  
 LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA  
 PEMERINTAH (LKPP) DAN INSTANSI TERKAIT  
 LAINNYA**

---

**Tujuan dan Hasil Pemeriksaan**

BPK telah melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Penyelenggaraan Katalog Elektronik Tahun 2016 dan 2017 (Semester I) pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Instansi terkait Lainnya. Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk menilai kesesuaian penyelenggaraan katalog elektronik pada LKPP telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Penyelenggaraan Katalog Elektronik Tahun 2016 dan 2017 (Semester I) pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Instansi terkait Lainnya **belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**

NO	TEMUAN
1	Tayangan tujuh produk Damen Dredger pada katalog elektronik tidak dapat diyakini kewajarannya
2	Dokumen pendukung struktur perubahan harga produk amphibious excavator yang diserahkan PT SLN kepada LKPP tidak dapat digunakan sebagai dasar perubahan harga tayang
3	Produk penyedia yang bermasalah, tayang di katalog elektronik
4	Penayangan unsur biaya kirim untuk 131 penyedia pada katalog elektronik tidak sesuai dengan kontrak katalog
5	Harga lima produk komoditas alat dan mesin pertanian yang tayang pada katalog elektronik bukan harga terbaik
6	Harga alat kesehatan tiga penyedia pada katalog elektronik kemahalan
7	Penayangan barang/jasa pada katalog elektronik dari lima penyedia tidak sesuai dengan jangka waktu yang tercantum dalam kontrak katalog

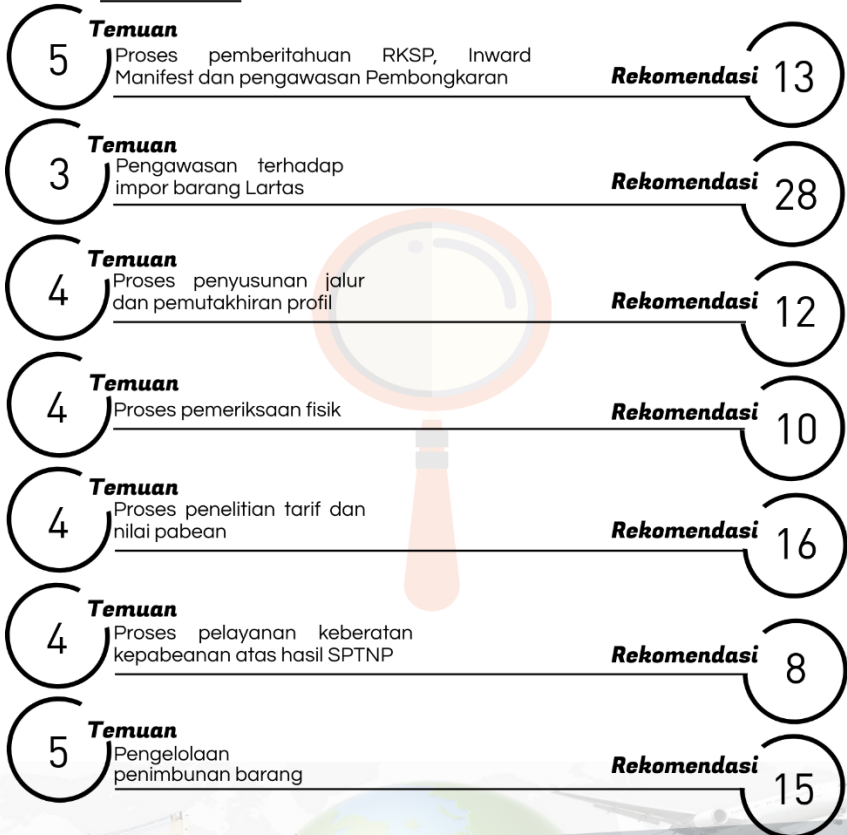


8	Dokumentasi proses pra kontrak katalog tidak diadministrasikan dengan tertib
---	--

Temuan- temuan yang akan dibahas lebih lanjut dalam telaahan ini adalah temuan yang mempengaruhi Penyelenggaraan Katalog Elektronik Tahun 2016 dan 2017 (Semester I) pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Instansi terkait Lainnya, yaitu pada temuan **nomor 1, 3, dan 8**.

**Hasil Pemeriksaan &  
Jumlah Rekomendasi**

<http://puskajiakn.dpr.go.id>



Berdasarkan hasil pemeriksaan, proses kepabeanaan atas kegiatan impor barang pada tujuh sasaran pemeriksaan **belum efektif** dalam aspek Regulasi, Sumber Daya Manusia, Sistem Informasi, sarana dan prasarana, serta proses pelaksanaannya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, proses kepabeanaan atas kegiatan impor barang pada tujuh sasaran pemeriksaan diatas **belum efektif dalam aspek regulasi, sumber daya manusia, sistem informasi, sarana dan prasarana, serta proses pelaksanaannya.**

NO	TEMUAN
<b>1. Proses pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RKSP), <i>Inward Manifest</i> dan pengawasan pembongkaran</b>	
1.1	Regulasi yang mengatur proses pemberitahuan RKSP, <i>Inward Manifest</i> dan pengawasan pembongkaran belum lengkap, belum jelas, dan belum selaras
1.2	Rangkap penugasan dalam pengawasan pembongkaran
1.3	Sistem Informasi belum terintegrasi secara internal dan belum menghasilkan data yang akurat
1.4	Akses data terkait waktu kedatangan dan bongkar kapal belum dimiliki serta janji layanan <i>Redress Manifest</i> belum terpenuhi
1.5	Pengawasan pembongkaran belum dilaksanakan secara rutin dan data manifes serta bongkar pada Tempat Penimbunan Sementara (TPS) <i>online</i> tidak lengkap dan <i>update</i>
<b>2. Pengawasan terhadap impor barang Larangan dan/atau Pembatasan (Lartas)</b>	
2.1	Regulasi yang mengatur pengawasan tentang barang Lartas belum lengkap, belum jelas dan belum selaras serta terlambat
2.2	<i>Customs Excise Information System and Automation (CEISA)</i> belum sepenuhnya terintegrasi dengan portal INSW dan belum menghasilkan data yang akurat
2.3	Proses penetapan, penentuan <i>Flag</i> dan pemotongan barang Lartas belum sepenuhnya sesuai ketentuan
<b>3. Proses penyusunan jalur dan pemutakhiran profil</b>	
3.1	Regulasi yang mengatur proses pemutakhiran profil belum lengkap dan belum selaras
3.2	Sebaran penempatan dan penugasan pegawai kurang tepat dan belum didukung dengan mekanisme penilaian kinerja dalam bentuk Sasaran Kerja Pegawai (SKP)
3.3	Sistem Informasi (SI) atas proses penyusunan jalur dan pemutakhiran profil belum sepenuhnya terintegrasi, ter- <i>update</i> secara periodik, dan <i>userfriendly</i>

3.4	Pelaksanaan kegiatan penyusunan jalur dan pemutakhiran profil belum sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dan manajemen risiko belum sepenuhnya diterapkan
<b>4. Proses pemeriksaan fisik</b>	
4.1	Regulasi yang mengatur proses pemeriksaan fisik barang impor belum lengkap, belum jelas dan belum selaras
4.2	Sarana dan prasarana pada kegiatan pemeriksaan fisik belum mencukupi dan tidak berfungsi dengan baik
4.3	Sistem Informasi (SI) kegiatan pemeriksaan fisik belum sepenuhnya menghasilkan data yang lengkap dan akurat
4.4	Kegiatan pemeriksaan fisik belum sepenuhnya didukung pejabat pemeriksa fisik yang memenuhi persyaratan dan belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai Perdirjen Nomor PER-12/BC/2016 tentang Pemeriksaan Fisik Barang Impor
<b>5. Proses penelitian tarif dan nilai pabean</b>	
5.1	Regulasi yang mengatur proses penelitian tarif dan nilai pabean belum lengkap, belum jelas dan belum selaras
5.2	Jumlah Pejabat Pemeriksa Dokumen belum memenuhi standar beban kerja dan belum ada standarisasi pengukuran kompetensi teknis
5.3	Data <i>Customs Excise Information System and Automation</i> (CEISA) Impor belum sepenuhnya lengkap dan terintegrasi
5.4	Pejabat Pemeriksa Dokumen (PPD) belum sepenuhnya cermat dan tepat waktu dalam melakukan penelitian tarif dan nilai pabean
<b>6. Proses pelayanan keberatan kepabeanan atas hasil Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP)</b>	
6.1	Regulasi yang mengatur proses keberatan dan perlakuan jaminan pada Rekening Penampungan Lainnya belum lengkap dan belum jelas
6.2	Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) belum memenuhi standar beban kerja
6.3	Proses keberatan belum didukung Sistem Informasi (SI) yang <i>Mandatory</i> dan terintegrasi pada <i>Customs Excise Information System and Automation</i> (CEISA)
6.4	Data keberatan tidak lengkap dan valid serta tidak pernah dilakukan rekonsiliasi dengan Bidang Perbendaharaan

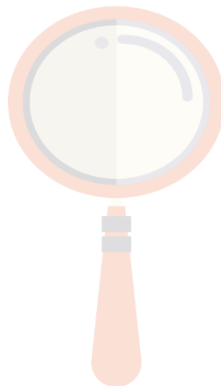
7. Pengelolaan penimbunan barang	
7.1	Regulasi yang mengatur pengelolaan Tempat Penimbunan Sementara (TPS) dan Tempat Penimbunan Pabean (TPP) termasuk Barang yang Dinyatakan Tidak dikuasai (BTD), Barang Dikuasai Negara (BDN), dan Barang Milik Negara (BMN) belum lengkap, belum jelas dan belum selaras
7.2	Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) belum mencukupi pada TPS dan belum dapat dilakukannya monitoring dan evaluasi terhadap petugas Bea dan Cukai di Tempat Penimbunan Pabean TPP
7.3	Sistem aplikasi TPS <i>online</i> dan TPP belum sepenuhnya terintegrasi dan menghasilkan data yang lengkap dan akurat, serta belum adanya aplikasi pengelolaan TPP untuk BTD, BDN dan BMN
7.4	Proses perizinan TPS tidak sesuai ketentuan zonasi dan sarana prasarana TPS tidak lengkap
7.5	Penetapan izin TPP dan BMN tidak sesuai ketentuan serta pengelolaan penyimpanan BTD, BDN, dan BMN belum optimal.

Permasalahan yang akan dibahas lebih lanjut dalam telaahan ini adalah permasalahan yang mempengaruhi efektivitas proses kepabeanan atas kegiatan impor barang, **yaitu pada nomor 2.2, 3.4, dan 5.4.**

## Hasil Pemeriksaan



**Temuan**



### Simpulan Pemeriksaan

Berdasarkan hasil pemeriksaan, masih terdapat **aturan yang belum ditetapkan** sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan praktik pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian yang **belum dilaksanakan dengan efektif**.

## Rekomendasi

- 1 Meningkatkan koordinasi dengan lembaga legislatif dan/atau eksekutif untuk mempercepat pembentukan peraturan perundang-undangan terkait UU tentang program penjaminan polis, PP tentang badan hukum usaha bersama, dan PP tentang badan hukum asing dan kepemilikan badan hukum asing, serta kepemilikan warga negara asing dalam perusahaan perasuransian
- 2 Segera melaksanakan pembubaran dan membentuk Tim Likuidasi untuk PT Asuransi Jiwa Bakrie untuk menyelesaikan kewajiban kepada pemegang polis
- 3 Memberikan pembinaan kepada Pengawas terkait pelaksanaan pedoman Pengawasan LJKNB Berbasis Risiko
- 4 Segera mengambil langkah-langkah sesuai ketentuan yang berlaku dalam penanganan AJB Bumiputera

BPK menemukan permasalahan-permasalahan yang dapat secara signifikan mempengaruhi efektivitas kegiatan pengawasan di sektor jasa perasuransian antara lain sebagai berikut:

NO	TEMUAN
1	Peraturan Perundangan yang diamanatkan UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian belum seluruhnya terbentuk
2	Kegiatan pengawasan perusahaan perasuransian belum didukung Sumber Daya yang memadai
3	Penanganan Perusahaan Asuransi bermasalah tidak konsisten
4	OJK belum menetapkan ketentuan terkait Lembaga Jasa Keuangan Non Bank Utama ( <i>Systemically Important Financial Institution</i> )
5	Tidak terdapat dokumen hasil review atas laporan penerapan manajemen risiko dan penempatan reasuransi
6	OJK tidak memublikasikan empat pencabutan Izin Usaha Perusahaan Perasuransian dan sembilan sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha Perusahaan Perasuransian
7	Pengawasan Perusahaan Asuransi/Reasuransi belum sesuai dengan Pedoman Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank (LJKNB) berbasis risiko
8	Penyelesaian AJB Bumiputera berlarut-larut

Permasalahan yang akan dibahas lebih lanjut dalam telaahan ini adalah permasalahan yang secara signifikan mempengaruhi efektivitas kegiatan pengawasan di sektor jasa perasuransian di nomor **1, 3, 7, dan 8.**

## Hasil Pemeriksaan



**Temuan**



**Simpulan  
Pemeriksaan**

BPS telah mengadopsi System of National Accounts (SNA) 2008 untuk penyusunan PDB dan PDRB Tahun 2016 dan 2017. Namun, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa penyusunan PDB dan PDRB Tahun 2016 dan 2017 belum efektif.

## Rekomendasi

- 1 Mengembangkan dan mengimplementasikan sistem penyusunan PDB dan PDRB yang terintegrasi dengan data dasar dari berbagai pihak terkait.
- 2 Menyusun NSDS Indonesia & mengusulkan penetapannya kepada Pemerintah
- 3 Menetapkan Strategi Implementasi SNA 2008 dan Sistem Neraca Nasional Indonesia dengan memperhatikan pengembangan "Satu Data Indonesia" serta IT Blue Print dan IT Road Map untuk perencanaan kegiatan TI pusat maupun daerah
- 4 Menugaskan Sestama untuk melakukan evaluasi kelembagaan dan menyesuaikan Struktur Organisasi dengan SNA 2008
- 5 Menginstruksikan seluruh Kepala BPS Provinsi untuk mendokumentasikan penghitungan PDRB secara lengkap



BPS telah mengadopsi *System of National Accounts* (SNA) 2008 untuk penyusunan Produk Domestik Bruto (PDB) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tahun 2016 dan 2017. Namun, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa penyusunan PDB dan PDRB Tahun 2016 dan 2017 **belum efektif**, karena permasalahan antara lain sebagai berikut:

NO	TEMUAN
1	Data dasar untuk penyusunan PDB belum sesuai kebutuhan sehingga dipenuhi dari data estimasi
2	Penghitungan PDB belum didukung pedoman dan dokumentasi yang lengkap
3	Pengelolaan Data PDRB pada BPS Provinsi DKI Jakarta, Kepulauan Riau dan Maluku belum memadai dan belum didokumentasikan secara lengkap
4	Penyusunan PDB dan PDRB belum didukung strategi pengembangan dan Sistem Neraca Nasional Indonesia
5	Penyusunan dan pengembangan <i>Supply and Use Table</i> belum didukung perencanaan, belum selesai, dan belum terdokumentasi dengan lengkap
6	Penyusunan PDB dan PDRB belum didukung peraturan dan sumber daya yang cukup
7	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas penyusunan PDB dan PDRB belum dilakukan secara memadai

Permasalahan yang akan dibahas lebih lanjut dalam telaahan ini adalah permasalahan yang mempengaruhi efektivitas penyusunan PDB dan PDRB Tahun 2016 dan 2017, **yaitu pada nomor 1, 2, 3, 4, dan 5.**